

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagian penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, atau dengan golongan elite di Negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang rendah atau kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan

memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang di akui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.¹

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang samasekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang

¹ Cut laila, “pengaruh jumlah penduduk, prduk domestic regional bruto (PDRB), dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten aceh barat”, skripsi, hal.1 (2016)

sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memnuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindak lanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, dan perluasan lapangan kerja.

Pemerintah telah banyak memuat kemajuan untuk memulihkan stabilitas makro-ekonomi. Namun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk kembali menggerakkan perekonomian dan membangun basis bagi pemulihan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan upah, mengurangi kemiskinan dan memastikan adanya kesempatan yang sama.

Sampai saat ini pemerintah terus mengembangkan beberapa kegiatan yang sangat terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Kontribusi yang diberikan oleh masing-masing kegiatan terhadap penurunan angka kemiskinan beragam, baik penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah selalu berupaya dengan melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program belum menampakan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dalam pencapaian tujuan karena kebijakan dari program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Pemerintah Provinsi Banten memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan

pemerintahan pusat, yaitu angka kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten diantaranya, banyaknya jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah di Provinsi Banten, tingginya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat PDRB dalam hal ini menjadi indikator untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, tingginya pengangguran, distribusi pendapatan yang belum merata, kesempatan kerja, inflasi, bencana alam, tingkat dan jenis pendidikan, investasi, ketersediaan fasilitas umum, tingkat upah neto, pajak, subsidi, penggunaan teknologi dan lainnya.

Provinsi Banten menjadi urutan kemiskinan ke enam dari 34 Provinsi di Indonesia. Penyebab utamanya adalah karena jumlah penduduk yang terlampaui tinggi yaitu sebanyak 61.001.166 penduduk terhitung dari tahun 2014-2018 dan ditahun 2018 mendiami peringkat ke lima dari 34 Provinsi di Indonesia.

Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun di sisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di suatu daerah menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi perdesaan maupun perkotaan serta antar sektor.²

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Sebagai dampak dari cepatnya pertumbuhan penduduk ini, manusia akan bergrumul untuk mencari

² Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta:Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN,2014), Cet. II, hal.. 68-269.2

nafkah untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya, melalui usaha penyediaan lapangan pekerjaan, sebab angkatan kerja akan semakin meningkat seandainya pertumbuhan ekonomi tidak mengimbangi pertumbuhan penduduk yang mengikat dengan pesat. Maka yang terjadi adalah pengangguran akan membengkak sehingga penduduk tidak memiliki pendapatan dan akan menambah kemiskinan di suatu daerah.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kenaikan Produk Domestic Bruto, namun disisi lain diperlukan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk meningkatkan produksi daerah dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Intinya dalam menuju sasaran pertumbuhan ekonomi suatu Negara terdapat unsur atau pun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama

atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi juga bertambah setiap tahun maka dibutuhkan penambahan pendapatan disetiap tahunnya.³

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang familier digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto di tingkat daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh

³Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hal.

dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui barang dan jasa oleh semua kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, semakin tinggi wilayah, maka semakin besar pula tingkat penerimaan wilayah tersebut namun PDRB tidak menjamin seluruh penduduk menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran dari kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya PDRB belum dapat disimpulkan apakah keadaan penduduk yang berpenghasilan rendah sudah membaik atau belum.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Banten dihitung dari tahun 2014-2018 setiap tahunnya mengalami kenaikan berdasarkan harga konstan. Namun dengan tingkat pertumbuhan PDRB tersebut bukan berarti provinsi Banten terhindar dari penduduk miskin. Hal ini dikarenakan terlampaunya jumlah penduduk yang mendiami Provinsi Banten sehingga pertumbuhan PDRB

tidak memiliki pengaruh yang berarti dikarenakan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan PDRB.

Menurut penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Diah prasasti, Provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi regional tinggi belum tentu memiliki PDRB per kapita yang tinggi pula, karena dalam menghitung PDRB per kapita selain ditentukan oleh tinggi rendahnya PDRB suatu wilayah juga ditentukan oleh jumlah penduduk wilayah tersebut.⁴

Penelitian yang saya lakukan mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ridzky geovani, dengan judul penelitian yaitu “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016”. Hasil penelitian dengan model terpilih *fixed effect* menunjukkan bahwa variabel pengangguran tidak signifikan terhadap

⁴ Diah prasasti,” Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional Dan Konvergensi”, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 21, No. 4,(2006), <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=10261>,diunduh pada 10 Juli 2020

kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari α 5%. PDRB berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari α 5%. variabel pendidikan yang diproksi dengan angka partisipasi sekolah tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY karena nilai probabilitasnya lebih besar dari taraf signifikansi yaitu sebesar (0,7008) dan koefisien sebesar (0,029172)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji apakah Jumlah Penduduk dan PDRB memiliki pengaruh terhadap kemiskinan Provinsi Banten ini, bagaimana dampaknya? Apakah positif atau negative. Dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto**

(PDRB)Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2014-2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasi hal yang berhubungan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provins Banten, yaitu jumlah penduduk dan pendapatan domestic regional bruto. Adapun identifikasi masalahnya antara lain:

- 1) Nilai kemiskinan yang dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dan penurunan
- 2) Jumlah penduduk di provinsi banten berada di urutan ke 5 dengan penduduk terbanyak dari 34 provinsi seluruh Indonesia
- 3) Terdapat ketimpangan dari peningkatan PDRB dengan jumlah penduduk
- 4) Tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2014-2018

- 5) Distribusi pendapatan yang belum merata keseluruhan lapisan penduduk terutama penduduk miskin

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas peneliti melakukan pembatasan masalah agar menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, untuk menghindari hal tersebut maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

- 1) Data yang digunakan adalah data Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun ke tahun
- 2) Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun ke tahun serta
- 3) Data Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten
- 4) Periode yang diambil adalah tahun 2014-2018

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan di Provinsi Banten?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten?
- 3) Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto secara simultan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di provinsi Banten ini mencakup manfaat teoritis dan praktisi yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan tambahan pengalaman tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dikampus dengan praktek yang diterapkan.

- b. Bagi lingkungan akademik

Manfaat bagi lingkungan akademik adalah diharapkan dapat berguna dalam menambah bahan bacaan bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten Pada Umumnya dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada khususnya.

2. Manfaat praktis

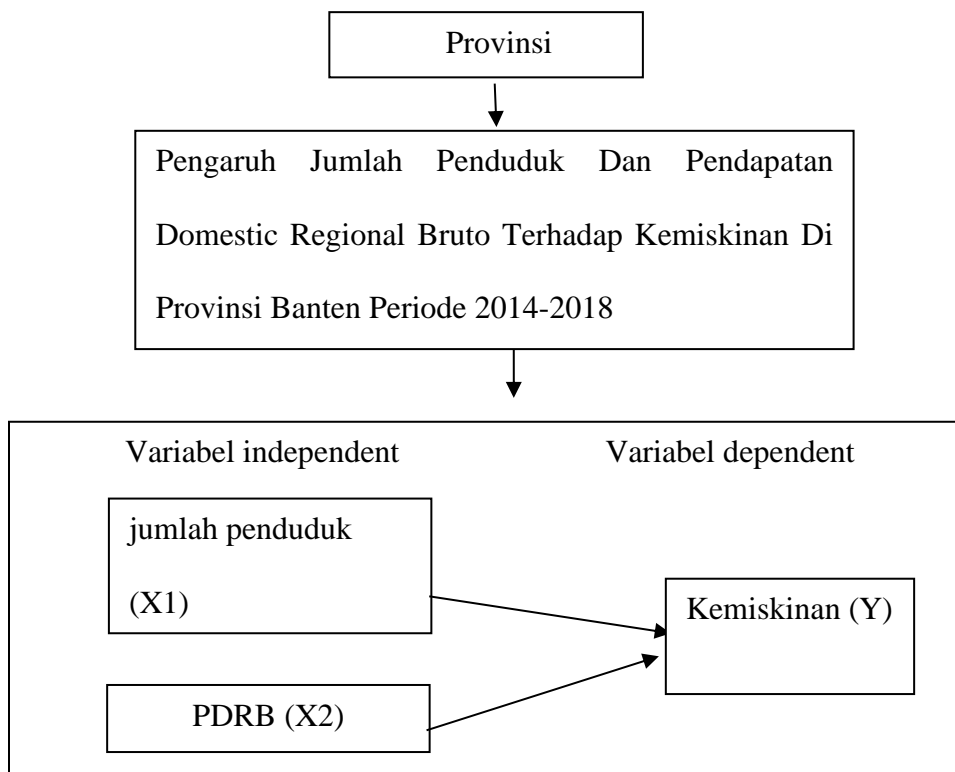
Menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi instansi-instansi terkait yaitu pemerintah maupun pihak lain untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Banten

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh dua variabel pembangunan ekonomi, antara lain jumlah penduduk dan laju PDRB dimana keduanya berperan sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi. Kedua variabel tersebut merupakan variabel independen yang bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan diregresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi, setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu mempengaruhi kemiskinan. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang

terkait mengenai penyebab kemiskinan di provinsi banten untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Maka skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Table 1.1



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab ke Satu Pendahuluan, pada bagian Pendahuluan ini akan diberikan gambaran mengenai topic penelitian yang akan disajikan. Pendahuluan berisi mengenai apa dan mengapa penelitian perlu dilakukan. Sehingga, pada bagian pendahuluan memuat beberapa hal penting berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka, Dalam bab ini dijelaskan mengenai Landasan Teori yang digunakan sebagai acuan penelitian yang merupakan seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang menjadi dasar dari penelitian, meliputi paparan teori, hubungan antar variabel, penelitian yang relevan serta hipotesis.

Bab ketiga Metodologi penelitian, Dalam metodologi penelitian berisi tata cara yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data maupun dalam mengolahnya. Metode penelitian ini meliputi tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi oprasional variabel, instrumen penelitian, uji instrument penelitian dan alat analisis data.

Bab keempat pembahasan hasil penelitian, yang meliputi deskripsi data, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

Bab ke lima penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.